

ISSN 978-625-6107-09-6



9 786236 107096

PERISTIWA PASCA-DOM DI ACEH (1998-2000)

HASBULLAH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI ACEH
(Wilayah Kerja Provinsi Aceh - Sumut)

Jln. TWK. Hasyim Banta Muda No. 17, Kp. Mulla, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh - 23123.

☎ 0651-23226 | 📠 0651-23226 | ✉ bpnbaceh@kemdikbud.go.id

🌐 <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaseh/>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI ACEH
(Wilayah Kerja Provinsi Aceh - Sumatera Utara)

**PERISTIWA PASCA-DOM DI ACEH
(1998-2000)**

Penyusun:

Hasbullah, S.S.

Editor :

Sanusi Ismail, S.Ag., M.Hum.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI ACEH**

Peristiwa Pasca-DOM di Aceh (1998-2000)

Hasbullah, S.S.

vi+29 hlm.14,8 x 21cm

ISBN: 978-623-6107-09-6

Judul

Peristiwa Pasca-DOM di Aceh (1998-2000)

Hasbullah, S.S.

Copyrights ©2021 BPNB Prov. Aceh

Editor

Sanusi Ismail, S.Ag., M.Hum.

Cover

Risky Syawal

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All rights reserved

Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh

Jl. TWK Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh

Telp/Faks. : +62651 – 23226

[http: bpnbbandaaceh@yahoo.com](mailto:bpnbbandaaceh@yahoo.com)

Perpustakaan Nasional

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

SAMBUTAN KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI ACEH

Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas selesainya penyusunan Seri Informasi Sejarah ini. *Booklet* ini mengisahkan peristiwa pasca-reformasi di Indonesia akibat perubahan besar pada sistem politik dan pemerintahan setelah lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, dan naiknya Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia.

Pasca-reformasi 1998, juga muncul aksi dan reaksi penarikan status DOM di Aceh yang telah berlangsung sejak akhir tahun 1980an-7 Agustus 1998 yang kemudian melahirkan beberapa Peristiwa Pasca-DOM di Aceh. Perubahan dalam periodisasi sejarah nasional ini turut mempengaruhi perubahan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Aceh. Untuk itu, BPNB Provinsi Aceh berupaya mendokumentasi peristiwa yang terjadi pada kurun waktu tersebut.

Booklet ini mengisahkan peristiwa-peristiwa yang berlangsung sejak 1998-2000an pada masa pemerintahan transisi Presiden Soeharto kepada B.J Habibie, berlanjut masa Presiden Abdurrahman Wahid dan diakhiri pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Peristiwa Pasca-DOM di Aceh ini melahirkan dinamika konflik yang multidimensi yang bisa dipadamkan setelah *MoU* atau Perdamaian Helsinki di Finlandia pada 15 Agustus 2005 setelah Aceh digoyang gempa 8.9 SR dan dihempas tsunami 26 Desember 2004.

Booklet ini bertujuan memberikan gambaran terkait peristiwa yang terjadi dalam dekade tersebut sehingga bisa menjadi pelajaran berharga bagi generasi muda milenial agar dapat memahami perjalanan sejarah lokal yang berdimensi nasional secara jernih dan bijak atas apa yang telah terjadi sehingga tertanam karakter cinta

kepada tanah air. Untuk itu, kami mengapresiasi pihak yang terlibat dalam penyusunan Seri Informasi Sejarah ini. Dan, semoga dapat bermanfaat hendaknya.

Banda Aceh, Oktober 2021
Plt. Kepala BPNB Aceh

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, vertical, looped shape that tapers to a point at the bottom, with a small horizontal stroke at the very end.

Drs. Nurmatias
NIP 196912261997031001

PENGANTAR PENULIS

Seluruh peristiwa dari berbagai aktivitas manusia di masa lalu terjadi dalam dimensi ruang dan waktu pasti meninggalkan jejak sejarah. Jejak peristiwa itu merupakan sumber sejarah. Sejarah sebagai ilmu menjadi sumber pembelajaran pada manusia yang ingin belajar, berpikir dan memahami setiap peristiwa yang terjadi sebagai pedoman bagi untuk bersikap lebih bijak dan lebih arif agar dapat melangkah ke depan dengan penuh keyakinan. Di sinilah letak 'sejarah sebagai guru atau pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupannya' (*historia magistra vitae*).

Seri Informasi Sejarah ini mengungkap peristiwa pasca-DOM di Aceh yang membuat konflik Aceh menjadi multidimensi dari tahun 1998-2000an. Pasca-reformasi 1998 telah memicu elemen masyarakat Aceh menuntut keadilan atas DOM dan berlanjut pada permintaan referendum. Hal ini membawa Aceh dalam pusaran konflik secara vertikal dan horizontal sejak 1998-2000an.

Seri Informasi Sejarah ini perlu diketahui oleh generasi muda khususnya milenial yang tidak merasakan secara langsung peristiwa di Aceh sehingga menjadi arif dan lebih bijak serta objektif menilai dinamika sejarah Aceh yang terjadi di masa itu sehingga menjadi pelajaran berharga. Berbagai peristiwa yang telah terjadi pada masa pasca-DOM (1998-2000an) adalah akumulasi konflik multidimensi akibat kebijakan yang diambil sebelumnya.

Untuk itu, perlu kearifan dan pemahaman yang lebih baik dan bijak bagi semua pihak terkait untuk meminimalisasi terjadinya peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang berdampak pelanggaran HAM yang pernah terjadi di masa lalu sehingga menjadi pelajaran untuk masa kini dan mendatang.

Penulis

DAFTAR ISI

<i>SAMBUTAN KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI ACEH</i>	<i>iii</i>
<i>PENGANTAR PENULIS</i>	<i>v</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>vi</i>
PENDAHULUAN	1
AKSI DAN REAKSI PENCABUTAN STATUS DOM	5
PERISTIWA PASCA-DOM DI ACEH	10
PENUTUP	26
<i>DAFTAR KEPUSTAKAAN</i>	<i>28</i>

BAGIAN I

PENDAHULUAN

Kisah sejarah dalam episode ini tidak bermaksud menegakkan ‘benang basah’ atau mengungkit kisah kelam sebagai ‘batang terendam’ dari peristiwa pasca-DOM (Daerah Operasi Militer) yang terjadi di Aceh dalam periode 1998-2000an. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, khususnya kepada generasi muda milenial yang lahir pasca-DOM untuk dapat mengetahui bagaimana jalannya konflik Aceh yang multidimensi sejak pasca-reformasi nasional yang terjadi di Republik Indonesia sejak paruh akhir tahun 1998.

Suasana politik nasional pada saat itu yang memanas akibat krisis ekonomi yang parah pada 1998 telah mengakibatkan munculnya pihak oposisi terhadap Orde Baru. Mahasiswa sebagai garda terdepan dan pelopor mulai menampakkan wujudnya dalam aksi menuntut perubahan. Aksi tersebut juga terjadi hingga ke daerah-daerah lainnya di Indonesia, termasuk di Aceh. Mahasiswa Aceh pada saat itu juga turut serta mengadakan aksi untuk menuntut reformasi politik dan ekonomi di daerahnya.

Pertama kali terjadi dalam beberapa dekade, di mana masyarakat Aceh dapat menyaksikan sebuah gerakan sipil yang menentang pemerintah berkuasa. Tuntutan utama saat itu adalah pengunduran diri Presiden Suharto. Mahasiswa dan elemen masyarakat Aceh pada awalnya hanya menuntut penurunan harga kebutuhan pokok atau sembako sebagai tuntutan nasional saat itu. Tuntutan mahasiswa dan masyarakat Aceh itu kemudian bergeser ke permasalahan politik, yaitu permintaan reformasi politik, seperti pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta mengkritisi pemilihan gubernur Aceh yang baru saja digelar oleh pemerintah.

PERISTIWA PASCA-DOM DI ACEH (1998-2000)

Tuntutan paling utama dari gerakan mahasiswa Aceh saat itu adalah pencabutan status DOM yang masih berlangsung di Aceh.

Dalam pemikiran masyarakat, kejatuhan rezim Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998 akan mengakhiri semua tindakan represi TNI/Polri dan berarti kemerdekaan bagi demokrasi. Hal ini, mengakibatkan aksi mahasiswa dan masyarakat meminta penarikan DOM kian menggelora di Aceh. DOM telah menyebabkan hilangnya para investor dari Aceh karena kerentanan keamanan dan banyaknya pungutan liar termasuk *pajak nanggroe*.¹

DOM telah memberikan peluang kepada TNI/Polri untuk dapat mencari keuntungan ekonominya di Aceh. Peredaran ganja pada saat itu telah dicurigai didalangi oleh oknum TNI dari Kopassus selama masa penerapan DOM sejak dari tahun 1989-1998, khususnya di Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar.²

Upaya mengakhiri DOM di Aceh pada saat itu ternyata direspon oleh para intelektual dan akademisi Aceh. Pada Januari 1998, Ghazali Abbas Adan, anggota PPP Komisi I DPR, menegaskan barang siapa tidak mendukung penghapusan DOM, berarti tidak mendukung agenda reformasi. Artinya telah melanggar hukum dan HAM di Indonesia.³

Pernyataan itu telah mengakibatkan mulai munculnya keberanian dari kalangan masyarakat dalam menuntut penarikan DOM di Aceh. Adalah para ulama dan santri dari 800an *dayah* (pesantren tradisional) di Aceh mengadakan serangkaian aksi di depan kantor DPRD I Aceh. Saat itu mereka bersinggungan dengan ribuan mahasiswa terkait permasalahan pemilihan Gubernur Syamsuddin Mahmud. Para ulama dan santri beraksi untuk mendukung gubernur, sedangkan

¹ Serambi Indonesia, tanggal 5 Juni 1998.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

PERISTIWA PASCA-DOM DI ACEH (1998-2000)

mahasiswa menolaknya. Akan tetapi, mereka ternyata satu ide untuk meminta pencabutan DOM di Aceh.⁴

Sebanyak 13 mahasiswa melakukan aksi mogok makan menuntut penarikan DOM di kampus Universitas Syiah Kuala (USK). Aksi mogok tersebut mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat dan pegawai pemerintah daerah di Aceh. Mereka bertemu dengan gubernur Syamsuddin Mahmud dan meminta batas waktu selama 10 hari untuk mengklarifikasinya dengan pemerintah pusat.⁵

Mahasiswa dan beberapa LSM di Aceh juga melakukan mobilisasi massa untuk menekan pemerintah dan mengangkat isu bahwa masa penerapan DOM telah menimbulkan kekejaman yang luar biasa di Aceh. Aksi itu melibatkan para janda dan anak-anak korban DOM untuk mengetuk hati para anggota DPRD Aceh saat itu.⁶

Kondisi politik nasional yang telah membuka kedok TNI yang sebelumnya tidak bisa terungkap. Saat itu, reputasi TNI/Polri sedang turun di mata masyarakat, khususnya pada Kopassus. Diawali dengan terbongkarnya beberapa kasus penculikan dan penyekapan mahasiswa di Jakarta, juga ikut membawa perubahan kebijakan pemerintah pusat untuk segera mencabut status DOM di Aceh.

Beberapa aktivis LSM dan mahasiswa mengangkat isu HAM di Aceh ke media massa. Mereka membawa dua orang perempuan janda korban DOM, yaitu Zuariyah dan Siti Aminah untuk menceritakan pelanggaran HAM terhadap suaminya kepada Komnas HAM dan Puspomad (Pusat Polisi Militer Angkatan Darat) yang saat itu disebut Pupom ABRI.

Sejak saat itu, pers nasional mulai berani menyoroti tindakan kekerasan terhadap masyarakat yang terjadi pada masa DOM. Selanjutnya, dua orang perempuan janda DOM lainnya, yaitu Muaziyah

⁴ Serambi Indonesia tanggal 7 Juni 1998.

⁵ Serambi Indonesia tanggal 9, 10, 15, 23 dan 27 Juni 1998.

⁶ Serambi Indonesia tanggal 16 Juni 1998.

PERISTIWA PASCA-DOM DI ACEH (1998-2000)

dan Cut Ima Keumala juga mengadukan nasib suaminya kepada Puspomad Mayjen Syamsu Djalal.

Suami Muaziyah, Hasbi Abdullah, seorang dosen USK (Universitas Syiah Kuala) telah ditangkap dan disiksa karena dituduh terlibat GPK pada tahun 1991 serta dijatuhi hukuman 17 tahun penjara. Sedangkan Cut Ima Keumala mengatakan bertemu suaminya Mahdi Yusuf untuk terakhir kalinya pada Oktober 1990. Suaminya hilang setelah ditangkap Letda Thamrin anggota intel Korem Teuku Umar. Saat itu, Puspomad berjanji akan meneliti kasus ini dan menjamin keselamatan keduanya hingga kembali ke Aceh.⁷

⁷ Forum Keadilan, tanggal 29 Juni 1998

BAGIAN II

AKSI DAN REAKSI PENCABUTAN STATUS DOM

Kelompok kritis gerakan mahasiswa dan akademisi mengadopsi situasi dan kondisi dalam memperjuangkan kasus pelanggaran HAM di Aceh sebelumnya. Saat itu, organisasi massa tumbuh bagai jamur musim hujan. Pertama kali muncul gerakan aksi setelah lahirnya KARMA yang diinisiasi oleh Senat Mahasiswa IAIN Ar-Raniry dalam rangka membentuk aliansi besar gerakan mahasiswa di Aceh. Prakarsa Senat Mahasiswa IAIN ini disambut oleh Senat Mahasiswa PTS lainnya.

Selanjutnya muncul SMUR pimpinan Aguswandi dari Unsyiah, FARMIDIA pimpinan Radhi Darmansyah dari IAIN Ar-Ranirri dan aliansi dari 12 senat mahasiswa swasta di Aceh yang ikut membentuk KARMA pada tanggal 1 Juni 1998 di Universitas Iskandar Muda.

LSM dan aktivis mahasiswa Aceh terus bekerja sama menggalang dan mendukung pencabutan status DOM (Daerah Operasi Militer). LSM melakukan advokasi terhadap korban DOM di Aceh dan mahasiswa menggalang aksi demonstrasi di DPRD I dan II sejak Mei 1998. Mereka menuntut pencabutan DOM, peninjauan kembali status Napol/Tapol serta penyisihan 10% dari *income* (pendapatan) proyek vital Aceh untuk membantu anggaran pendidikan Aceh.⁸

Aktivis mahasiswa Aceh yang tergabung dalam KARMA dipimpin oleh Taufik Abda berangkat ke Jakarta. Dalam perjalanan, di

⁸Lihat, Surat Gubernur KDH Aceh No. 520/16588, tanggal 29 Juli 1998.

PERISTIWA PASCA-DOM DI ACEH (1998-2000)

Medan mereka bertemu dengan Pangdam Bukit Barisan untuk memohon pencabutan DOM di Aceh.

Sampai di Jakarta, mereka bertemu dengan anggota DPR dan beberapa instansi terkait serta bekerja sama dengan aktivis pelajar dan mahasiswa Jakarta asal Aceh dengan koordinator Fajran Zein dan Fadli Ali. Mereka menghadap perwakilan PBB di Indonesia dan diterima oleh Anne Brigette Abretten. Selanjutnya mereka menghadap perwakilan ICRC (*International Cross Red Committe*) atau PMI (Palang Merah Internasional) untuk mengantisipasi tindakan kekerasan militer di Aceh.⁹

DPR membentuk tim Pansus (Panitia Khusus) Aceh dan merekomendasikan pengusutan HAM (Hak Azasi Manusia) di Aceh. Sebelum pengusutan dilakukan pemerintah di Aceh, wakil ketua Pansus Nashiruddin Daud dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) DPR diculik oleh OTK (Orang Tak Dikenal) dari penginapannya di Medan. Selang beberapa hari kemudian, mayatnya ditemukan di Tanah Karo, Sumatera Utara. Sejak saat itu, rekomendasi Pansus DPR mengalami stagnansi.

Masyarakat Aceh skeptis terhadap pemerintah pusat seperti yang ditunjukkan elite, DPRD I dan II, ulama tradisional, maupun tokoh masyarakat Aceh. Hal ini mendorong semakin tingginya sentimen masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat. Gubernur Aceh, Syamsuddin Mahmud dan Ketua DPRD I Teuku Johan beserta 35 tokoh dan pejabat sipil akhirnya menghadap Presiden B.J Habibie di Istana Negara Jakarta pada 8 Januari 1999.

Pada saat itu, Gubernur Syamsuddin Mahmud menyerahkan Pernyataan Rakyat Aceh yang menginginkan diadakan pengusutan terhadap pelanggaran HAM dan menarik DOM di Aceh. Saat itu, Presiden B.J Habibie berjanji dan meminta DPKSH (Dewan Pemantapan

⁹Serambi Indonesia, tanggal 29 Juli 1998.

PERISTIWA PASCA-DOM DI ACEH (1998-2000)

Keamanan dan Sistem Hukum) untuk melakukan pembahasan terkait usulan tersebut.¹⁰

Pada tanggal 7 Agustus 1998, atas perintah Presiden B.J Habibie pihak militer akhirnya menarik status DOM dan tanggung jawab keamanan serta ketertiban sepenuhnya dibebankan pada masyarakat, ulama dan pemerintah daerah termasuk satuan-satuan TNI/Polri yang ada di Aceh. Pihak militer juga meminta maaf pada masyarakat atas segala bentuk pelanggaran dan kekerasan yang dilakukan mereka dan berjanji bila terbukti bersalah akan diperiksa secara hukum.

Penarikan pasukan militer non-organik ke baraknya dijanjikan dalam rentang waktu satu bulan kemudian. Petinggi militer menghimbau anggota GAM yang berada di luar Aceh agar kembali ke kampung halaman untuk turut serta membangun Aceh.¹¹

Hal inilah yang mendorong munculnya perlawanan baru terhadap pemerintah dan TNI/Polri pasca-DOM. Kelompok aksi mahasiswa yang tergabung dalam KARMA (Kesatuan Aksi Reformasi Mahasiswa Aceh) di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1998, mengeluarkan pernyataan sikap ditujukan kepada presiden dan petinggi ABRI (TNI/Polri) serta instansi terkait untuk menggelar pengadilan pelanggaran HAM serta ganti rugi kepada korban, menanggung biaya hidup korban atau keluarganya, serta membebaskan tanpa syarat dan merehabilitasi semua Tapol/Napol Aceh.¹² Presiden B.J. Habibie pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1998, atas nama pemerintah memohon maaf terhadap perlakuan TNI/Polri di seluruh Indonesia termasuk Aceh. Para

¹⁰Pada saat itu Ketua DPRD I Aceh T. Johan mengatakan pada Presiden, pada prinsipnya masyarakat Aceh 80% masih pro-NKRI dan 20% GPK, namun kelompok ini sangat mobil sehingga pemerintah harus hati-hati dalam melihat realitas tersebut. Serambi Indonesia dan Republika tanggal 9 Januari 1999.

¹¹Serambi Indonesia tanggal 8 Agustus 1998.

¹²Serambi Indonesia, tanggal 8 Agustus 1998.

PERISTIWA PASCA-DOM DI ACEH (1998-2000)

Tapol/Napol Aceh yang keterlibatannya dianggap kecil diberikan amnesti umum.

Pemerintah membentuk Komnas HAM dan Sekretaris Jenderal HAM melakukan klarifikasi di Aceh pada 20-24 Agustus 1999. Hasilnya menyebutkan pelanggaran selama DOM tahun 1989-1998 menemukan 781 meninggal karena kekerasan, 163 kasus orang hilang, 368 kasus penganiayaan, 102 pemerkosaan, 102 pembakaran rumah penduduk. Petinggi TNI/Polri saat itu mencemaskan pengumuman tim Komnas HAM tersebut dan menyangsikan keakuratan data yang dikumpulkan serta meragukan keberadaan kuburan massal di Aceh.¹³

Hal ini tentunya menimbulkan kemarahan di kalangan kelompok kritis mahasiswa dan elite masyarakat Aceh. Tokoh Aceh Ghazali Abbas Adan mengatakan jika kasus ini tidak ditindaklanjuti pemerintah maka akan dibawa ke komisi HAM PBB atau Mahkamah Internasional. Petinggi TNI/Polri tidak menyetujui jika prajurit yang telah berjuang dianggap melanggar HAM, Panglima ABRI (TNI) Jenderal Wiranto mengatakan hal itu pada rapat Komisi di DPR.¹⁴ Hal ini turut membuat benturan antara TNI/Polri dengan masyarakat Aceh yang pada saat itu sangat mendambakan terwujudnya keadilan.

Presiden Habibie pun merespon gejala yang terjadi dalam masyarakat Aceh yang menuntut keadilan HAM. Pemerintah pusat memberikan alat tawar pada masyarakat Aceh berupa pemberian otonomi khusus serta realisasi pembentukan Sabang sebagai *Kapet* (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) di Aceh. Saat itu, beberapa menteri diutus ke Aceh untuk mengadakan pertemuan dengan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Menteri Sosial Yustika Baharsyah yang bertindak sebagai ketua utusan pemerintah pusat memberikan paket bantuan untuk keluarga DOM sebesar Rp2.600.000,00.¹⁵ Paket bantuan

¹³Serambi Indonesia, 25 Agustus 1998, dan Waspada, 25 Agustus 1998.

¹⁴Kompas tanggal 14 September 1998, pada saat itu Jenderal Wiranto mengatakan, "pengusutan terhadap militer akan membuat prajurit kecut dan gundah".

¹⁵Serambi Indonesia, tanggal 9 Oktober 1998

PERISTIWA PASCA-DOM DI ACEH (1998-2000)

ini menjadi polemik karena harta benda yang dirampas TNI/Polri dan GPK pada masa DOM dinilai jauh lebih besar dari jumlah bantuan pemerintah tersebut.¹⁶

Pada Sidang Umum MPR di Jakarta tanggal 10 November 1998, di mana momentum ini digunakan kelompok kritis Aceh untuk menyuarakan aspirasinya. Beberapa aktivis kampus yang tergabung dalam KAMMI, Senat Mahasiswa IAIN Ar-Ranirry, ARMED, FORMAS, SMUR, ARMADA, juga mengadakan rangkaian unjuk rasa di gedung DPRD Aceh pada tanggal 7, 10, 13, dan 21 November 1998.

Tuntutan kelompok aksi bergeser menjadi pencabutan terhadap azas tunggal Pancasila, pengembalian 80% hasil eksploitasi sumber daya alam daerah, merehabilitasi korban DOM dan mendesak agar Presiden Soeharto beserta petinggi ABRI (TNI) secara struktural yang terlibat DOM termasuk unsur pemerintah daerah, pemberantasan maksiat secara konsekuen serta memperjelas status otonomi sebagai daerah istimewa dalam perundang-undangan. Batas waktu diberikan kelompok kritis sampai Maret 1999, apabila tidak ada realisasi nyata mereka mendesak mundur Gubernur Aceh Syamsuddin Mahmud, dan Ketua DPRD Teuku Djohan.¹⁷

Pemerintah mengakomodasi hal tersebut dengan melakukan koordinasi dengan Muspida, DPRD, ulama, intelektual, aktivis mahasiswa dan politisi untuk mengakomodasi semua tuntutan dalam suatu Dokumen Pernyataan Bersama.¹⁸

Sebelum penarikan DOM diwujudkan, sudah terjadi pengembalian imigran Aceh dari Malaysia sejak 26 Juni 1998. Sebanyak 545 imigran Aceh yang terlibat GAM dikembalikan ke Aceh. Hal ini menyebabkan kerusuhan di Kampung Semenyih Malaysia yang mengakibatkan delapan orang, termasuk Polisi Diraja Malaysia tewas

¹⁶ Serambi Indonesia, tanggal 26 November 1998.

¹⁷ Lihat pernyataan sikap KAMMI 7 November 1998, Pokok-Pokok Pikiran IAIN Ar Ranirry, SMUR, dan ARMED 10 November 1998. Formas tanggal 11 November 1998 dan Pokok-Pokok Pikiran ARMADA, tanggal 21 November 1998.

¹⁸ Serambi Indonesia, tanggal 21 Desember 1998.

PERISTIWA PASCA-DOM DI ACEH (1998-2000)

terbunuh. Hal ini ikut mendorong mengapa kemudian terjadi konflik di Aceh setelah penarikan DOM 7 Agustus 1998.

Pada 28 Maret 1998, Sodako Ogata (UNHCR) mengkritisi pemulangan imigran dengan alasan dalam perlindungan mereka. Akan tetapi, mereka sudah diekstradisi ke Aceh sebelum penarikan DOM di Aceh. Salah satu di antaranya, Amni Marzuki yang ditangkap oleh TNI/Polri dan ditahan di Kutacane Aceh Tenggara sejak Agustus 1999.¹⁹

BAGIAN III

PERISTIWA PASCA-DOM DI ACEH

Beberapa peristiwa pasca-DOM terjadi di Aceh dalam periode 1998-2000an. Peristiwa itu dimulai sejak berhentinya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998. Naiknya Wakil Presiden B.J Habibie sebagai Presiden ternyata membawa perubahan situasi di Aceh. Sampai kemudian terpilihnya Abdurrahman Wahid (Gusdur) sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999 dengan segala dinamika di pusat dan daerah hingga pemakzulan Gusdur sebagai presiden dengan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri, sejak 23 Juli 2001 melalui Sidang Umum MPR.

Kondisi ini melahirkan beberapa kebijakan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat bersama DPR. Hal ini ikut berpengaruh terhadap situasi politik, ekonomi, sosial di Aceh yang sedang terlibat pergumulan politik dengan RI. Adapun beberapa peristiwa pasca-DOM 1998-2000an yang terjadi dalam periode ini disusun secara kronologis sebagai berikut.

¹⁹Laporan *Sumatra Human Right Wacht Network*, 1998.

A. Peristiwa Masa Peralihan Presiden Soeharto ke B.J Habibie (Sejak 21 Mei 1998)

1. Munculnya Intimidasi dan Provokasi

Beberapa tokoh Aceh saat itu memprediksi TNI/Polri tidak akan melepaskan status operasinya dan tidak mau bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM di Aceh. Hal ini otomatis memunculkan perlawanan GAM yang mulai menampakkan aktivitasnya kembali sejak DOM dicabut. Ketika DOM dicabut, media massa masih melaporkan adanya intimidasi terhadap saksi kuburan massal yang diculik OTK. Para pegawai diteror oleh orang-orang bertopeng yang ingin tahu apakah mereka bekerja dengan LSM.²⁰ Selain itu, korban perkosaan DOM juga diintimidasi oknum Kopassus karena melaporkan apa yang sudah terjadi pada mereka. Dua oknum Kopassus berusaha menculik istri M. Yunus Ahmad, yaitu korban penculikan yang telah menghilang Maret 1998. Di sisi lain pengibaran bendera GAM terus terjadi di perkampungan.²¹

Masyarakat yang terprovokasi sesaat setelah wawancara dengan Burhanuddin Lopa di Rumoh Geudong yaitu rumah yang digunakan Kopassus Pos Sattis Bili Aron Pidie sejak 1991 dibakar massa. Akan tetapi tidak ada satu pun pelaku yang ditangkap akibat pembakaran rumah tersebut.²²

Begitu juga di Aceh Utara, setelah upacara penarikan 652 personil TNI/Polri kontingen kedua kesatuan non-organik pada tanggal 1 November 1998, massa mengikuti konvoi dan mengejek perbuatan TNI/Polri serta mempengaruhi masyarakat lainnya melakukan tindakan anarkis dengan merusak dan membakar pos-pos polisi, kantor pemerintah dan gedung sekolah.

²⁰ *Sidney Morning Herald*, tanggal 15 Agustus 1998.

²¹ *Serambi Indonesia* tanggal 19 Agustus 1998.

²² *Ibid.*

PERISTIWA PASCA-DOM DI ACEH (1998-2000)

Aksi itu juga mengakibatkan sejumlah toko dan kios WNI keturunan, kantor DPD Golkar Aceh Utara dan Lapas Lhokseumawe terbakar. Kemudian di hari selanjutnya terus terjadi kerusakan yang menjalar di beberapa kecamatan di Aceh Utara sehingga didatangkan bantuan TNI/Polri dari Bireuen dan Medan Sumatera Utara untuk menertibkan kerusakan. Akibatnya seorang anak kecil tewas tertembak TNI/Polri ketika menghalau perusuh.²³ Hal ini memunculkan polemik baru, antara kelompok aktivis kritis dan TNI/Polri tentang siapa dalang kerusakan. Kelompok kritis menuduh TNI/Polri merekayasa aksi massa agar dapat berkuasa kembali di 'Kota Petro Dollar', sedangkan pihak militer menuding aksi itu dilakukan oleh GAM.²⁴

2. Munculnya Kelompok Ahmad Kandang

Sejak tanggal 2 November 1998 di Kandang yang sangat dekat dengan lokasi LNG Aron dan Mobil Oil terjadi penaikan bendera GAM. Mereka berkonvoi di sepanjang jalan raya dari Geudong sampai ke Makam Malikussaleh. Sepanjang jalan itu, Muhammad Rasyid alias Ahmad Kandang menurunkan bendera RI disertai dengan tembakan dan yel-yel GAM.

Ahmad Kandang, lulusan militer di Libya yang kembali dari Malaysia mengadakan *peusijuek* senjata di kompleks Makam Malikussaleh dan kemudian melakukan razia. Mereka menangkap dua perwira Korem Lilawangsa, yaitu Mayor CAJ S. Harahap beserta istrinya. Selain menganiaya, mereka juga membakar mobilnya. Mereka memukul dan memborgol Lettu Suwarno. Meski aparat TNI/Polri terus mengejar kelompok tersebut, namun Ahmad Kandang dapat meloloskan diri.²⁵

Satuan Brimob Polri diturunkan untuk mengejar kelompok Ahmad Kandang. Akan tetapi dia dilindungi di kediamannya oleh tetangga yang mengepung rumah tersebut. Aparat Brimob melepas

²³ Serambi Indonesia, tanggal 1, 2, dan 3 November 1998.

²⁴ Serambi Indonesia, tanggal 1, 2, dan 3 November 1998.

²⁵ Serambi Indonesia, tanggal 4 November 1998.

PERISTIWA PASCA-DOM DI ACEH (1998-2000)

tembakan ke arah massa dan menyebabkan beberapa anggota Brimob dan seorang warga yang diduga anggota GAM tewas serta beberapa lainnya luka-luka tertembak. Pasca peristiwa penyerbuan, gedung RRI di depan rumah Ahmad Kandang dibakar OTK, yang berbuntut ditangkapnya 63 orang masyarakat sekitar yang diperiksa Polri.²⁶

Pada tanggal 4 November 1998, Pangdam I Bukit Barisan, Ismet Yuzairi mengatakan tidak akan bertoleransi dengan sipil bersenjata yang mencoba mengancam rakyat dan berpisah dengan NKRI. Kehadiran sejumlah imigran yang diekstradisi dari Malaysia yang tinggal di Kandang telah melakukan aktivitas politik GAM tanpa dapat dirintangi oleh TNI/Polri. Sebagian dari mereka sudah tidak dikenal lagi oleh masyarakat setempat. Sebagian dari penduduk Kandang telah pindah untuk menghindari kemungkinan yang lebih buruk.²⁷

Saat itu, keberhasilan Ahmad Kandang meloloskan diri dari sergapan militer menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. Ada dugaan, itu rekayasa atau provokasi dari pihak tertentu untuk mengembalikan status konflik dan penerapan DOM kembali.²⁸

3. Penculikan dan Pembunuhan Anggota TNI/Polri

Keberhasilan Ahmad Kandang meloloskan diri ternyata menaikkan moral pengikutnya. Kekuatan mereka bertambah setelah bergabungnya Daud A. Bakar, seorang pentolan GAM Wilayah Idi yang pernah ditahan pada tahun 1997 dengan hukuman 20 tahun penjara. Dia berhasil meloloskan diri dari Lapas Langsa pada 7 Oktober 1998.

Mereka melakukan razia di Lhok Nibong perbatasan Aceh Utara - Aceh Timur. Mereka melucuti senjata jenis *Colt 38* milik Serma Pol. Warman staf Polres Pidie. Mereka juga menculik tujuh prajurit Yonif 113/Jaya Sakti Bireuen yang sedang cuti pulang ke Medan di dalam bus

²⁶ Waspada, tanggal 16 November 1998.

²⁷ Serambi Indonesia, 14 Februari 1998.

²⁸ *Sumatra Human Right Watch Network*, 1998.

Kurnia. Ketujuh prajurit itu dieksekusi dan mayatnya dibuang ke sungai, Krueng Arakundo.²⁹ Kelompok Ahmad Kandang juga menculik dan membunuh dua anggota militer lainnya, yaitu Mayor Ediyanto Abbas (Dansatgas Marinir) dan Serka Syarifuddin (Koramil Muara Dua) ketika sedang melakukan inspeksi di Kandang.³⁰

4. Pembunuhan Pembantu Operasi Militer DOM

Pembunuhan terhadap informan sipil atau 'cuak' serta kehadiran ninja dan pembunuh profesional sebagai upaya balas dendam pihak GAM membuat kondisi di Aceh tidak aman. Militer menuduh pihak GAM biang dari pembunuhan misterius sebagai balas dendam terhadap informan sipil (tenaga pembantu operasi). Akan tetapi realitas menunjukkan pembunuhan itu tidak hanya dilakukan oleh GAM saja, akan tetapi juga oleh Kopassus untuk menghilangkan jejak para saksi dari tindakan mereka pada masa DOM.

Sejak Desember 1998 - Juni 1999 di seluruh Aceh telah terjadi 60 kasus pembunuhan. Umumnya sebanyak 65% yang terbunuh tersebut adalah para kepala desa atau *keuchik* yang pernah menjabat kepala desa pada masa DOM.³¹

5. Operasi Wibawa 1999

- Peristiwa Pusong

Penculikan anggota TNI/Polri membuat Pangdam Bukit Barisan A. Gaffar Rahman memerintahkan penambahan 12 SSK (Satuan Setingkat Kompi) TNI untuk operasi pencarian korban penculikan anggota militer dengan sandi Operasi Wibawa. Operasi yang digelar sejak awal tahun 1999, di bawah kendali Polda Aceh dan dipimpin

²⁹ Serambi Indonesia, tanggal 30 Desember 1998.

³⁰ Serambi Indonesia, tanggal 31 Desember 1998.

³¹ Laporan LSM Flower Banda Aceh tahun 1998-1999

PERISTIWA PASCA-DOM DI ACEH (1998-2000)

langsung Kolonel Juharnus Wiriadinata serta Kapolres Aceh Utara, Letkol Iskandar Hasan.

Operasi militer dalam rangka mencari Ahmad Kandang dan pengikutnya dilakukan di Blang Kandang dan Pusong membuat rakyat ketakutan sehingga sebagian melakukan eksodus untuk menghindari kekerasan. Sebanyak 227 KK warga desa Meunasah Blang ikut mengungsi sehingga kampung nyaris kosong dan yang tinggal hanya 10 KK lagi.

Sedangkan, warga Pusong yang dituduh menculik Mayor Ediyanto Abbas mengadakan aksi demo meminta klarifikasi. Mereka beramai-ramai menuju kantor Bupati Aceh Utara. Pada saat itu, Linud 100/PS Medan melakukan penghadangan terhadap aksi massa dari desa tersebut, mereka melakukan tembakan yang membabi buta. Akibatnya, 11 orang warga desa gugur, dan 32 terluka akibat terkena tembakan aparat. Sebagian besar yang tewas pada saat itu adalah anak-anak dan perempuan karena mereka yang berada di barisan paling depan.

Aksi penembakan juga terjadi di Paloh, Simpang Keuramat dan Buloh Blang Ara. Setelah penembakan terjadi, beberapa gedung pemerintah dan kantor polisi dibakar massa karena peristiwa tersebut. Aparat menangkap 170 orang warga masyarakat yang diduga terlibat. Mereka yang dianggap tidak terlibat kemudian dibebaskan secara bertahap dan yang terlibat ditahan di Gedung KNPI Lhokseumawe.³²

- Peristiwa Gedung KNPI Lhokseumawe

Pada tanggal 9 Januari 1999, Operasi Wibawa dilakukan untuk mencari Ahmad Kandang. Pada saat itu sudah ditahan 40 orang, termasuk 33 orang yang sebelumnya telah ditahan di Gedung KNPI Lhokseumawe serta dua orang di antaranya harus mengalami perawatan medis.

³²Serambi Indonesia, tanggal 5 Januari 1999

PERISTIWA PASCA-DOM DI ACEH (1998-2000)

Saat itu, rekan-rekan prajurit ingin melakukan pembalasan karena penculikan pihak GAM kepada mereka yang ditahan di Gedung KNPI Lhokseumawe. Pada hari itu, Mayor Bayu Najib, Danyon 113/Jaya Sakti beserta prajuritnya menerobos masuk ke Gedung KNPI Lhokseumawe.

Mereka menyiksa 38 orang yang ditahan di sana. Akibatnya empat orang tahanan tewas seketika, dua orang koma, dan 23 orang lainnya luka-luka parah sehingga harus dirawat di RSUD Lhokseumawe. Hal ini mengakibatkan munculnya aksi mahasiswa yang menuntut kekerasan Operasi Wibawa agar segera diusut.

Pihak militer merespon dan memperkarakan Mayor Bayu Najib dengan hukuman 7 tahun penjara dan dipecat, serta tiga prajuritnya, yaitu Amsir, Manolam Situmorang dan Effendi yang divonis 7 tahun penjara dan juga dipecat dari kesatuannya.

TNI mengatakan akan mengusut 28 prajurit militer sebagai contoh untuk pembinaan. Padahal menurut saksi mata, mereka mengatakan lebih 100 tentara yang melakukan penganiayaan para tahanan di Gedung KNPI Lhokseumawe.³³

- Peristiwa Kekerasan di Idi Cut (Krueng Arakundo)

Pada tanggal 3 Februari 1999 terjadi kekerasan setelah adanya pengajian umum yang disebut TNI/Polri sebagai ceramah GAM. Setelah pengajian bubar, 28 peserta pengajian tewas terbunuh di antaranya terdapat anak-anak. Delapan korban ditenggelamkan dengan batu di sungai Krueng Arakundo dan lima orang mengalami luka tembak. Serangan pada saat usai pengajian di Idi Cut itu dilakukan oleh Linud 100/PS Sumatera Utara dari Kodam Bukit Barisan dengan melakukan tembakan membabi buta.

³³Waspada, tanggal 31 Januari 1999.

PERISTIWA PASCA-DOM DI ACEH (1998-2000)

- **Peristiwa Kekerasan di Paloh Lada (Simpang KKA)**

Peristiwa kekerasan pihak militer ini terjadi pada tanggal 3 Mei 1999 saat aksi protes masyarakat terhadap represi militer oleh beberapa kampung yang ada di sekitar Paloh Lada dengan berkumpul di Simpang KKA, Aceh Utara.

Sebagian besar korban yang tembak adalah perempuan dan anak-anak saat mereka diberondong dari belakang oleh pasukan Arhanud 001 dan Batalyon 113. Aksi ini sempat terekam oleh kameramen RCTI dan melaporkan dalam liputan beritanya. Pada peristiwa ini dilaporkan 46 orang tewas, 156 mengalami luka tembak dan 10 orang hilang.

- **Peristiwa Kekerasan di Berbagai Daerah**

Pada saat Operasi Wibawa digelar ada beberapa peristiwa lainnya terjadi, di antaranya terjadi di Peudada Aceh Utara pada tanggal 25 Mei 1999, setelah terjadi kontak tembak antara PPRM dengan OTK. Dalam penyisiran PPRM empat orang tewas dan 12 lainnya luka-luka karena tertembak. Setelah itu, terjadi lagi kekerasan di Alue Nireh Aceh Timur pada saat penyisiran PPRM. Peristiwa ini menewaskan lima orang perempuan dan anak-anak. Ketika aparat sedang melakukan patrol, tiba-tiba ban truk aparat meletus sehingga pasukan PPRM kaget dan melepaskan tembakan membabi buta pada warga yang berada di pinggir jalan raya Banda Aceh-Medan.

- **Peristiwa Beutong Ateuh (Teungku Bantaqiah)**

Penyerbuan ke Beutong Ateuh, tepatnya ke pesantren Teungku Bantaqiah yang sebenarnya berada dalam wilayah Korem Teuku Umar. Namun, operasi penyerbuan dilakukan pada tanggal 23 Juni 1999 Korem Lilawangsa yang dipimpin oleh Kasintel Sujono dan dibantu PPRM.

Teungku Bantaqiah dan pengikutnya pada hari itu hendak menyiapkan salat Jumat. Mereka tidak menduga akan diserbu oleh

PERISTIWA PASCA-DOM DI ACEH (1998-2000)

pihak militer. Akibat dari serangan militer ini Teungku Bantaqiah beserta 70 orang pengikutnya tewas. Sebagian korban yang sebelumnya selamat diangkut dengan truk untuk diobati ke Lhokseumawe. Namun, di tengah perjalanan mereka tewas dieksekusi militer, sedangkan beberapa korban lainnya 'hilang'.

- Perusakan dan Pembakaran Gedung Sekolah dan Gedung Pemerintah

Selama penerapan Operasi Wibawa 1999 telah mengakibatkan banyak terjadinya pengrusakan dan pembakaran sekolah yang diduga dilakukan oleh masyarakat dan GAM. Pihak TNI/Polri menuduh masyarakat dan GAM yang membakar sekolah, akan tetapi GAM menolak terlibat dalam pembakaran sekolah dan mereka bertanggung jawab atas pembakaran gedung pemerintah.

Menjelang pelaksanaan Pemilu 1999, aktivitas pemerintahan daerah di Aceh nyaris terhenti. Sebagian besar pegawai pemerintah kembali ke daerah masing-masing dan ada juga yang meninggalkan Aceh. Sebagian tugas dan aktivitas pemerintah diambil alih oleh GAM, misalnya urusan perkawinan dan pewarisan tanah. Pada saat itu, mereka merujuk serta menunjuk pesantren setempat untuk menjalankannya.

6. Meluasnya Konflik Menjelang Pemilu 1999

- Operasi Sadar Rencong I (OSR I)

Pemerintah akhirnya terpaksa menambah pasukan TNI/Polri ke Aceh. Sebanyak 435 PPRM dikirim ke Aceh pada tanggal 6 Mei 1999. Pangdam Bukit Barisan Mayjen A. Gaffar mengatakan penambahan kekuatan ke Aceh Barat dan Aceh Selatan yang sebelumnya tidak tersentuh konflik untuk mengantisipasi kerusuhan menjelang Pemilu 1999.

PERISTIWA PASCA-DOM DI ACEH (1998-2000)

Pada saat penurunan pasukan ke Aceh Barat dan Aceh Selatan sempat terjadi kontak tembak. Tujuh orang prajurit dari Yonzipur I Medan dan dua anggota Polri tewas di Gunung Malem, Aceh Jaya.

Sejak saat itu, Korem Teuku Umar Kolonel Juharnus Wiranata mengumumkan Aceh Barat dalam kondisi Siaga I dan menambah 830 TNI serta 480 Polri dari Brimob dan Gegana dikirm ke Aceh untuk menyukseskan Pemilu 1999 di Aceh.

- Munculnya Barak Pengungsi dan Pengungsian

Ketakutan di tengah intimidasi membuat masyarakat Aceh di pedalaman banyak yang mengungsi ke daerah-daerah yang relatif aman. Masyarakat ekonomi menengah lebih banyak yang mengungsi ke Medan Sumatera Utara atau ke pulau Jawa. Sedangkan masyarakat dengan ekonomi kelas bawah lebih memilih mengungsi ke mesjid-mesjid, sekolah-sekolah, dan kantor-kantor pemerintah. Mereka mengungsi untuk menyelamatkan diri karena kebrutalan TNI/polri dan GAM serta ketakutan akan ditangkap setelah terjadinya suatu kontak senjata antara pihak yang bertikai.

Mendekati Pemilu 1999, eskalasi kekerasan semakin menanjak di Aceh. Jumlah warga yang meninggalkan rumah semakin bertambah banyak. Mereka menghindari kekerasan militer yang menganjurkan untuk ikut Pemilu yang dilaksanakan secara nasional. Di antara mereka ada yang lari ke hutan-hutan dan bersembunyi di gunung-gunung.³⁴

Para pengungsi dibantu oleh LSM yang mendirikan pos-pos kemanusiaan atau PCC (*People's Crisis Center*). Para aktivis PCC sering diintimidasi oleh TNI/Polri dan juga GAM. Sejumlah pengungsi dihalangi untuk kembali ke desanya karena faktor keamanan dan kontak tembak antara TNI/Polri dan GAM. Akibatnya ada anggota PCC yang diculik dan

³⁴Laporan LSM Flower Aceh. Saat itu aAda 17 titik kamp pengungsian dari Januari sampai Juni 1999. Sampai akhir 1999, tinggal 4 kamp pengungsi lagi.

dilatih jadi anggota GAM apabila ada tindakan mereka yang tidak menyenangkan pihaknya.

- Kelompok Aktivitas Pemerintahan dan Perekonomian Masyarakat

Pada pertengahan tahun 1999, ada peningkatan dukungan masyarakat kepada GAM karena aksi TNI/Polri yang lebih banyak menyengsarakan rakyat. Represi militer menjadikan alasan munculnya nasionalisme Aceh dan dukungan kepada GAM. Pada saat itu GAM jadi berkembang ke seluruh Aceh.

Akan tetapi tidak lama kemudian terjadi perpecahan dalam organisasi GAM, yaitu antara kubu Teungku Hasan Tiro dengan kubu Husaini Hasan.³⁵ Kubu Teungku Hasan Tiro memiliki kekuatan bersenjata sedangkan kubu Husaini Hasan tidak. Perpecahan terjadi pada Mei 1998, di mana Teungku Hasan Tiro telah memecat Husaini Hasan, Yusuf Daud, Syahbuddin Abdurrauf, Idris Mahmud dan M.Daud Husen.³⁶ Perpecahan ini menyebabkan tewasnya tokoh GAM kubu Husaini Hasan di Malaysia, yaitu Teungku Don Zulfahri.

Perseteraan antara kelompok GAM tampak kemudian di mana kelompok Teungku Hasan Tiro tidak mau kompromi dan meminta pihak RI mengembalikan Aceh dalam bentuk kesultanan dengan Teungku Hasan Tiro sebagai sultan atau wali.

Pada Juni 2000 Burhanuddin Lopa bertemu dengan komandan GAM Abdullah Syafii dan berdialog. Akan tetapi, tidak ada kesepakatan damai yang bisa diwujudkan kala itu.³⁷

7. Operasi Sadar Rencong II (OSR II)

³⁵Serambi Indonesia, tanggal 17 januari 2000

³⁶Waspada, tanggal 10 Mei 1999.

³⁷Kompas, tanggal 6 Juni 2000.

PERISTIWA PASCA-DOM DI ACEH (1998-2000)

Ketika akhir jabatan Presiden B.J Habibie, di Aceh sejak tanggal 1 Agustus 1999, diumumkan operasi militer dengan nama sandi, Operasi Sadar Rencong II. Operasi ini dikendalikan oleh Polri dengan penanggung jawab Kapolda Aceh Bahrumisyah Kasman. Sejak saat itu operasi gabungan disebar ke seluruh Aceh termasuk Aceh Barat dan Aceh Selatan.

Meski pemerintah tidak mengumumkan peralihan dari Operasi Sadar Rencong I ke Operasi Sadar Rencong II, namun operasi itu sendiri sudah berjalan sejak Mei sampai Desember 1999.³⁸ Sejak 18 Agustus 1999, PPRM sudah ditarik dari Aceh dan larangan operasi ke desa-desa. Sejak saat itu, telah terjadi perkembangan dan dukungan pada GAM di seluruh Aceh.

Pada saat Sidang Umum MPR di Jakarta, akhirnya diakomodasi usul dari daerah konflik Aceh dan Papua. Realisasi untuk Aceh adalah penetapan sebagai Daerah Istimewa dengan otonomi khusus sebagaimana diatur undang-undang.³⁹

8. Peristiwa Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid

- Penundaan Kodam Iskandar Muda

Pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid sejak tanggal 20 Oktober 1999, terjadi perubahan besar terhadap Aceh, di mana dibentuk Menteri Negara Perberdayaan HAM dalam Kabinet Persatuan Nasional dan memilih Hasballah M Saad dari Aceh sebagai menterinya.

Tiga hari setelah menjabat pada 31 Oktober 2000, dia berhasil mempengaruhi presiden untuk menunda pembentukan kembali Kodam Iskandar Muda karena permintaan tokoh masyarakat dan GAM. Akibatnya, Pangdam Bukit Barisan Mayjen A Gaffar Rahman

³⁸ Waspada tanggal 2 Januari 2000.

³⁹ Hasil TAP MPR /SU-MPR/1999, (Departemen Penerangan RI, 1999), hlm.8

PERISTIWA PASCA-DOM DI ACEH (1998-2000)

memerintahkannya bawahannya melakukan *regrouping* Koramil karena keterbatasan anggota setelah ditariknya PPRM dari Aceh ke Jakarta.

- Mobilisasi Massa Pawai Pendukung Referendum

Mobilisasi massa terbesar yang pernah dilakukan di Aceh sejak penarikan DOM terjadi pada 8 November 1999 di Masjid Raya Baiturrahman. Diperkirakan sekitar 200.000an orang hadir di bawah koordinasi Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA). Mereka menyampaikan Petisi kepada presiden, DPR/MPR agar menyetujui pelaksanaan referendum secara demokratis di bawah pengawasan PBB atau lembaga independen.⁴⁰

Setelah SU-MPR di Banda Aceh, massa yang terprovokasi membobol penjara-penjara Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) dan merusak pos-pos polisi. Saat itu upaya meminta referendum semakin bergema di Aceh, apalagi saat tur ke luar negeri Presiden Abdurrahman Wahid sempat mengeluarkan statemen di Kamboja bahwa referendum di Aceh boleh saja, "Kalau Timor-Timur boleh, kenapa Aceh tidak boleh?". TNI/Polri sangat gusar atas pernyataan presiden yang mengundang disintegrasi bangsa itu, sehingga DPR membentuk Pansus dalam menangani masalah tersebut.⁴¹

- Operasi Sadar Rencong III (OSR III)

Sejak Desember 1999, pemerintah dan militer mengganti sandi operasi Operasi Sadar Rencong II ke Operasi Sadar Rencong III pada tanggal 2 Februari 2000. Tumbuhnya semangat nasionalisme Aceh sangat ditakuti oleh pemerintah dan militer karena ancaman disintegrasi bangsa yang semakin terasa di Aceh.

⁴⁰ Serambi Indonesia tanggal 4 dan 5 November 1999.

⁴¹ Serambi Indonesia tanggal tanggal 17 Desember 1999.

PERISTIWA PASCA-DOM DI ACEH (1998-2000)

Sejak 1 Januari 2000, Polri telah mengumumkan operasi yang bersifat lebih represif. Tujuan operasi ini adalah menangkap 800 GAM dan simpatisannya. Operasi bersifat represif karena pendekatan defensif yang dilakukan sejak Operasi Sadar Rencong II telah gagal.⁴²

Sejak operasi ini dilaksanakan telah terjadi beberapa peristiwa yang menimbulkan korban dari relawan kemanusiaan, di antaranya Sukardi aktivis YRBI yang ditemukan tewas dengan luka tembak pada tanggal 31 Januari 2000. Sebelumnya, Fakhurrrazi (aktivis Pemraka) yang diculik di pos PCC Blang Mamplam Aceh Utara pada 6 Januari 2000 dan Munir seorang aktivis Forum Peduli HAM yang hilang setelah diculik dari rumahnya di Tangse Pidie pada 26 Januari 2000.

Korban dari aktivis muslim, di antaranya M. Dahlan dari Taliban yang diculik dari rumahnya di Leubok Pidie. Dia ditembak di depan rumahnya pada tanggal 9 Januari 2000. Beberapa pos aktivis muslim di Banda Aceh dan Aceh Besar digerebek oleh aparat karena ditenggarai sebagai *underbow* GAM.

Korban dari pegawai Pemerintah Daerah dialami oleh Agusri yang bekerja di Kantor Dinas Pajak Aceh Selatan. Dia diculik tanggal 10 Januari 2000 saat mengobati anaknya di Medan dan mayatnya ditemukan di Deli Serdang Sumatera Utara.

Korban dari politisi juga terjadi pada masa penerapan operasi ini, di antaranya Nashiruddin Daud anggota DPR dari fraksi PPP. Dia adalah aktivis HAM dari Aceh Selatan yang diculik dari penginapannya di Medan Sumatera Utara tanggal 24 Januari 2000.⁴³

Korban dari petugas medis juga terjadi di antaranya adalah korban Zulfan yang diculik dari rumahnya di Teupin Raya Pidie tanggal 21 Februari 2000. Mayatnya ditemukan di jalan raya tidak jauh dari rumahnya.⁴⁴

⁴²Waspada, tanggal 2 Januari 2000

⁴³ Laporan *Amnesty International* (Index:ISAI, 21/06/00 Tahun 2000

⁴⁴ Serambi Indonesia, tanggal 11 Maret 2000.

PERISTIWA PASCA-DOM DI ACEH (1998-2000)

Selain itu, korban dalam insiden pada Operasi Sadar Rencong III, yaitu penangkapan mahasiswa dari Firmidia beserta sopir mobil yang ditumpangi mereka pada 6 Maret 2000 di PT. Arun Lhokseumawe. Mereka baru dilepas setelah dianiaya berat oleh militer pada tanggal 8 Maret 2000.⁴⁵

Penggerebekan pos-pos PCC juga marak terjadi di beberapa daerah di Aceh. Selain itu, intimidasi kepada wartawan lokal, nasional dan internasional seperti RCTI dan *Associated Press Reuter*. Beberapa kasus pembunuhan masyarakat sipil seperti anak-anak dan orang dewasa saat operasi ini berjalan umumnya karena tembakan oleh aparat dan GAM saat operasi yang membabi buta dilaksanakan.

- **Aktivis Aceh Minta Perlindungan HAM**

Pada masa penerapan operasi militer ini para aktivis di Aceh minta perlindungan HAM pada tanggal 4 Januari 2000 dengan melakukan mogok makan. Pada tanggal 25 Januari 2000 gabungan mahasiswa Aceh juga meminta adanya gencatan senjata. Aksi ini dilakukan bersama LSM lokal pada tanggal 26 Januari 2000.

- **Kongres Perempuan Aceh**

Kongres perempuan Aceh yang dinamakan dengan *Duek Pakat Inong Aceh* dilaksanakan di Banda Aceh pada tanggal 20-22 Februari 2000 yang diikuti oleh 400 peserta. Kongres ini menyepakati 22 butir usulan, di antaranya menyerukan gencatan senjata, penarikan pasukan non-organik dan permintaan 30% wakil perempuan dalam proses pembuatan keputusan politik di daerah.⁴⁶

⁴⁵ Siaran Pers SIRA tanggal 10 Maret 2000.

⁴⁶ Siaran Pers Duek Pakat Inong Aceh, 23 Februari 2000

PERISTIWA PASCA-DOM DI ACEH (1998-2000)

Selama kongres berlangsung terjadi ancaman dari TNI/Polri dan GAM.⁴⁷ Ada sinyalemen kongres didanai oleh USAID, suatu lembaga swadaya asing. Hal ini telah menyulut ketegangan dalam pergerakan sipil di Aceh.

- Perjanjian Jeda Kemanusiaan

Akibat kegagalan konsolidasi antara pemerintah dengan GAM mengatasi konflik, maka pemerintah terpaksa mengadakan *Joint of Understanding on Humanitarian Pause for Aceh* (Perjanjian Kesepakatan Bersama Jeda Kemanusiaan) antara RI-GAM. Pihak RI diwakili oleh Hasan Wirayuda, duta besar Indonesia untuk PBB. Sedangkan pihak GAM diwakili oleh Zaini Abdullah, menteri kesehatan GAM pada tanggal 12 Mei 2000.

Namun, di lapangan kesepakatan ini banyak dilanggar oleh kedua pihak, terutama terhadap butir-butir kesepakatan bersama. Bahkan, beberapa tokoh aktivis tewas tertembak, seperti Teungku Kamal di Aceh Selatan dan Jakfar Siddik di Sumatera Utara. Tokoh Aceh yang ditembak OTK pada masa ini, yaitu Safwan Idris (Rektor IAIN Ar Ranirry) dan Dayan Dawood (Rektor Universitas Syiah Kuala) dan Ketua DPRD I Aceh, Teuku Djohan.⁴⁸

- Operasi Militer Terbatas (OCM I)

Sampai akhir tahun 2000, konflik Aceh seakan tidak kunjung usai, akibatnya masyarakat Aceh tetap dalam situasi sulit terperangkap dalam konflik dan kekerasan. TNI/Polri dan GAM sama-sama tidak mau surut dalam mempertahankan ideologinya masing-masing.

Setelah terhentinya penjanjian moratorium kekerasan yang ditanda tangani oleh RI dan GAM di Jenewa Swiss atas prakarsa *Hendry*

⁴⁷ Jakarta Post, tanggal 27 Februari 2000.

⁴⁸ Kontras No.9/XI/2000

PERISTIWA PASCA-DOM DI ACEH (1998-2000)

Dunant Centre pada tanggal 6-9 Januari 2001. Perjanjian Jeda Kemanusiaan II yang hanya berlangsung satu bulan saja sejak tanggal 15 Januari 2001. Perjanjian ini gagal, yang menyebabkan Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Inpres No.4/2001 tentang Operasi Militer Terbatas di Aceh.⁴⁹

Sejak saat itu, di Aceh dilaksanakan sandi *Operasi Cinta Meunasah I* (OCM I). Operasi militer ini lebih mengedepankan pendekatan kultural dalam operasi militer di Aceh.

BAGIAN VI

PENUTUP

Dalam kurun waktu 1998-2000 di Aceh terjadi peristiwa pasca-DOM berupa kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dimulai sejak masa transisi dari Presiden Soeharto ke Presiden B.J Habibie hingga masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid. Setelah penarikan DOM, muncul kelompok Ahmad Kandang mengawali penculikan dan pembunuhan terhadap anggota TNI, pembunuhan

⁴⁹ Analisa, 9 Maret 2001 dan Serambi Indonesia tanggal 13 Maret 2001.

PERISTIWA PASCA-DOM DI ACEH (1998-2000)

pembantu operasi DOM, yang berlanjut dengan peristiwa kekerasan lainnya dalam Operasi Wibawa yang dijalankan TNI/Polri sejak tahun 1999.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid sempat ditunda pembentukan Kodam Iskandar Muda. Di sisi lain, munculnya mobilisasi massa dan pawai menuntut referendum setelah penarikan PPRM (Pasukan Penindak Rusuh Massa) membuat pemerintah pusat memberlakukan OSR (Operasi Sadar Rencong I, II dan III). Akibatnya, justru melahirkan banyak korban baru, di antaranya; relawan kemanusiaan, aktivis muslim, pegawai Pemda, politisi, petugas medis, dan beberapa insiden serta pembunuhan terhadap masyarakat sipil, intimidasi kepada aktivis HAM, kongres perempuan Aceh yang menentang kekerasan yang berlanjut dengan lahirnya perjanjian jeda kemanusiaan. Pelanggaran terhadap jeda kemanusiaan juga dilakukan oleh kedua pihak yang bertikai.

Pada akhir pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dikeluarkan kebijakan yang memberlakukan Operasi Militer Terbatas di Aceh dengan sandi OCM I (*Operasi Cinta Meunasah I*). Operasi Militer Terbatas ini berjalan sejak awal tahun 2001 hingga pergantian estafet presiden kepada Megawati Soekarno Putri pada tanggal 23 Juli 2001 dalam Sidang Istimewa MPR. Pergantian ini, ternyata tidak menghentikan konflik Aceh yang terus-menerus melahirkan peristiwa kekerasan pasca-DOM hingga tercapainya kesepakatan perdamaian antara RI-GAM dalam *MoU Helsinki* pada 15 Agustus 2005.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Sumber Surat Kabar Sezaman, Laporan, dan Majalah:

Analisa, tanggal 9 Maret 2001

Formas, tanggal 11 November 1998.

Forum Keadilan, tanggal 29 Juni 1998.

Jakarta Post, tanggal 27 Februari 2000.

PERISTIWA PASCA-DOM DI ACEH (1998-2000)

Kontras No.9/XI/2000.

Kompas tanggal 14 September 1998.

Kompas, tanggal 6 Juni 2000.

Laporan *Amnesty International* (Index:ISAI, 21/06/00 tahun 2000.

Laporan LSM Flower Banda Aceh tahun 1998-1999.

Laporan LSM Flower Banda Aceh tahun 1999-2000.

Penyataan Sikap KAMMI tanggal 7 November 1998

Pokok-Pokok Pikiran IAIN Ar Ranirry, SMUR, dan ARMED tanggal 10 November 1998.

Pokok-Pokok Pikiran ARMADA, tanggal 21 November 1998.

Republika tanggal, 9 Januari 1999.

Serambi Indonesia, tanggal 14 Februari 1998.

Serambi Indonesia, tanggal 5, 7, 9, 10, 15, 16, 23, 27 Juni 1998.

Serambi Indonesia, tanggal 29 Juli 1998.

Serambi Indonesia, tanggal 8, 19, 25, Agustus 1998.

Serambi Indonesia, tanggal 9 Oktober 1998

Serambi Indonesia, tanggal 1, 2, 3, 4, 26 November 1998.

Serambi Indonesia, tanggal 21, 30, 31 Desember 1998.

Serambi Indonesia, tanggal 5, 9 Januari 1999.

Serambi Indonesia, tanggal 17 Januari 2000.

Serambi Indonesia tanggal 13 Maret 2001.

Siaran Pers *SIRA* tanggal 10 Maret 2000.

Siaran Pers *Duek Pakat Inong Aceh*, tanggal 23 Februari 2000

Sidney Morning Herald, tanggal 15 Agustus 1998.

PERISTIWA PASCA-DOM DI ACEH (1998-2000)

Sumatra Human Right Wacht Network, 1998.

Surat Gubernur KDH Aceh No. 520/16588, tanggal 29 Juli 1998.

TAP MPR /SU-MPR/1999, (Departemen Penerangan RI, 1999)

Waspada, 25 Agustus 1998.

Waspada, tanggal 16 November 1998.

Waspada, tanggal 31 Januari 1999.

Waspada, tanggal 10 Mei 1999.

Waspada tanggal 2 Januari 2000